

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
DIVISI PELAYANAN HUKUM								
A	Bidang Administrasi Hukum Umum							
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Rp 2.527.800.000	Pelayanan publik lainnya	Melaksanakan layanan kewarganegaraan melalui pengambilan sumpah kewarganegaraan verifikasi data kewarganegaraan	TW 3
							Melaksanakan Pelantikan PPNS	TW 2, TW 3
							Melakukan Pelantikan notaris	TW 1, TW 4
							Pengawasan PMPJ	TW 2
							Sosialisasi/Diseminasi/Rakor	TW 1,TW 2, TW 3
							Publikasi,pameran,helpdesk	TW 1, TW 3
							Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan koordinasi pusat	TW 1,TW 2, TW 3

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
DIVISI PELAYANAN HUKUM								
							Pemantauan dan evaluasi layanan AHU di wilayah	TW 4
						Perkara Hukum lembaga	Advokasi perkara terkait produk layanan AHU di wilayah	TW 3
						Pengawasan kenotariatan oleh majelis pengawas di wilayah	Dukungan kesekretariatan oleh Majelis Pengawas Wilayah	TW1, TW 2, TW 3,TW 4
							Dukungan kesekretariatan oleh Majelis Pengawas Daerah	TW1, TW 2, TW 3,TW 4
							Dukungan kesekretariatan dan pengawasan MKNW	TW1, TW 2, TW 3,TW 4
B	Bidang Kekayaan Intelektual				Rp2.021.065.000			
1	Penyelenggaraan Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Rp120.730.000	1. Pengawasan KI	Kerjasama Pemantauan Pengawasan KI dengan Instansi Terkait	TW III dan TW IV
							Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI	TW III dan TW IV
						2. Pendampingan Penanganan Aduan Pelanggaran KI	Koordinasi Penanganan Aduan/ pelanggaran/ Penyelesaian Sengketa KI	TW IV
			Persentase Masyarakat yang	70%	Rp1.495.140.000	1. Diseminasi dan Edukasi KI	Melakukan Diseminasi Hak Cipta & Desain Industri	TW I

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
DIVISI PELAYANAN HUKUM								
			Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah				Melakukan Diseminasi Merek dan Indikasi Geografis	TW I
							Melakukan Diseminasi KI Lainnya	TW I
							Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Edukasi KI	
						2. Agenda Guru Kekayaan Intelektual	Melaksanakan Kegiatan Ruki di Luar Kota	TW II
							Melaksanakan Kegiatan Ruki di Dalam Kota	TW II
						3. Penyebarluasan Informasi KI	Melaksanakan kegiatan Booth Pameran KI	TW II
							Melaksanakan Talkshow Radio terkait layanan KI	TW I
							Melaksanakan Talkshow TV terkait layanan KI	TW I
							Melaksanakan Podcast terkait layanan KI	TW I
			Persentase Peningkatan Permohonan	20%	Rp405.195.000	1. Pendampingan Pengajuan Permohonan KI	Koordinasi Layanan Kekayaan Intelektual ke pusat	TW II

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
DIVISI PELAYANAN HUKUM								
			Kekayaan Intelektual di Wilayah				Pendampingan Pengajuan Permohonan KI di daerah	TW II

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
DIVISI PEMBENTUKAN REGULASI								
1	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	361.531.000	1. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	- Membuat Tim Pokja dalam rangka Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Perancangan Peraturan Daerah - Melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah - Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait - Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah - Membuat Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	TW I, TW II,TW III, TW IV

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
DIVISI PEMBENTUKAN REGULASI								
		Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undanganDifasilitasi oleh Kantor Wilayah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 orang	193.706.000	2. Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah	- Melaksanakan Kegiatan Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah - Melaksanakan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah - Membuat Laporan Pelaksanaan Pembinaan Perancangan Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah	TW II, TW III
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	55.853.000	1. Analisis dan Evaluasi Produk Hukum	- Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan AE - Melaksanakan FGD - Melaksanakan rapat perumusan rekomendasi hasil AE - Melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan AE dan evaluasi Tindak Lanjut AE tahun sebelumnya - Melaksanakan	TW I, TW II

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
DIVISI PEMBENTUKAN REGULASI								
							Peningkatan Pemahaman Analisis dan Evaluasi	
			2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	72.400.000	1.Fasilitas Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	- Melaksanakan Kegiatan Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik - Melaksanakan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	TW II, TW III, TW IV
3	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	183.278.000	1.Pengelolaan JDIH	- Melaksanakan koordinasi mengenai peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan - Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan JDIH	TW I, TW II

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
DIVISI PEMBENTUKAN REGULASI								
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	1.072.000.000	1.Pelaksanaan verifikasi permohonan bantuan hukum litigasi	- Melaksanakan verifikasi permohonan bantuan hukum litigasi pada aplikasi sidbankum	TW I, TW II, TW III, TW IV
			2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Lltigasi	80%	202.730.000	2.Pelaksanaan verifikasi permohonan bantuan hukum non litigasi	- Melaksanakan verifikasi permohonan bantuan hukum non litigasi pada aplikasi sidbankum	TW I, TW II, TW III, TW IV
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	177.464.000	1.Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum	- Melakukan kegiatan temu sadar hukum pada kelompok sadar hukum - Melakukan penyuluhan hukum keliling - Melaksanakan penyuluhan hukum tidak langsung berupa penyebarluasan informasi hukum di media digital - Melakukan pembinaan anggota atau koordinasi	TW I, TW II, TW III

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
DIVISI PEMBENTUKAN REGULASI								
							ke BPHN mengenai Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum - Melaksanakan pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum	
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	349.622.000	1.Kesekretariatan Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	1. Surat Keputusan tentang Tim Sekretariat Wilayah Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 2. Surat penyampaian kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk membentuk tim kerja dan tim asesor	TW I

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
DIVISI PEMBENTUKAN REGULASI								
						2.Kesekretariatan Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	1. Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) 2. Laporan Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum Kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	TW II
						3.Kesekretariatan Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	Laporan partisipasi dan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	TW III
						4.Kesekretariatan Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	TW IV

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA								
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum program Dukungan Manajemen	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	29.081.402.000	1. Perencanaan dan Organisasi	Melakukan Penyusunan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum	TW III
							Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja pada setiap DIPA di Kanwil Hukum setiap triwulan, termasuk kendala dan alternatif solusi apabila tidak tercapai target RO yang telah ditetapkan (laporan capaian kinerja)	TW I, TW II, TW III, TW IV
							Melakukan sinkronisasi Laporan target CRO dengan Penginputan CRO di dalam SAKTI	TW I, TW II, TW III, TW IV
							Melakukan Monitoring Alokasi Anggaran sesuai dengan besaran SBKU dan SBKK yang ditetapkan	TW II, TW III, TW IV
							Melakukan penyusunan, review, dan monitoring SOP dan standar pelayanan	TW I

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA								
							Menyusun laporan kinerja, Laporan bulanan, Laporan triwulan, laporan tahunan	TW I, TW II, TW III. TW IV
							Melakukan penyusunan RKT dan Disbursement Plan	TW IV
							Melakukan penelahaan rencana kerja dan anggaran (pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Pagu Alokasi, Analisa Kebutuhan Anggaran)	TW II, TW III, TIV
							Membangun Zona Integritas menuju WBBM dan memastikan pemenuhan data dukung RKT RB dan LKE ZI	TW I, TW II, TW III, TW IV
							Memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko	TW I, TW II, TW III, TW IV

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA								
						2. Keuangan	Menyusun Rencana Penarikan Dana setiap Triwulan, melakukan proses pengajuan UP ke KPPN, melakukan pemetaan rencana kegiatan dengan pagu anggaran dengan memisahkan anggaran yang masih diblokir, mereview setiap kegiatan yang telah berjalan agar sesuai dengan RPD, melakukan proses pengajuan SPM GU dan LS, membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara setiap akhir bulan berjalan, mengisi data capaian ouput setiap bulan pada awal bulan berikutnya.	TW I, TW II, TW III, TW IV
							Melakukan Rekonsiliasi Keuangan Tingkat Nasional	TW I, TW III
						3. Pengelolaan BMN	Penyusunan Laporan BMN	TW I, TW III

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA								
							Penggunaan , penghapusan dan pemindahtanganan BMN, penatausahaan BMN	TW I, TW II, TW III, TW IV
							Melakukan Perencanaan BMN	TW III
						4. Kehumasan, Kerjasama, dan Protokol	Melakukan Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kantor Wilayah	TW I, TW II, TW III, TW IV
							Menggandeng media eksternal dalam menciptakan citra positif	TW I, TWII, TW III, TW IV
							Mengelola Website dan Konten Media Sosial	TW I, TWII, TW III, TW IV
							Memfasilitasi kegiatan audiensi, koordinasi, dan sinergitas dengan pihak eksternal dan stakeholder lainnya	TW I, TW II, TW III, TW IV
							Mengelola Kanal Informasi dan Pengaduan Masyarakat	TW I, TW II, TW III, TW IV
						5. Pembinaan Administrasi kepegawaian	Melakukan perekapan data dan pegawai yang mengalami perpindahan jabatan dari pejabat	TWI

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi	
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)	
BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA									
							pengawas ke pejabat fungsional serta perpindahan dalam jabatan fungsional	TW I	
							Melakukan pemutakhiran data pegawai yang mengalami perpindahan jabatan dari pejabat pengawas ke pejabat fungsional serta perpindahan dalam jabatan fungsional		
							Melakukan dan memproses data kesejahteraan kepegawaian (penerbitan SK Pangkat, KGB, SK Pensiun)		TW I , TW II, TW III dan TW IV
							Mengusulkan diklat yang diperlukan untuk kebutuhan organisasi		TW I
							Mendata pegawai yang akan mengikuti ujian kompetensi kenaikan jenjang dan perpindahan dalam jabatan fungsional		TW I, TW IV

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA								
							mengkoordinir pemberian penomoran surat dinas	TW I , TW II, TW III dan TW IV
						6. Teknologi Informasi	Melakukan Fasilitasi Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Sesuai Kebutuhan	TW I, TW II, TW III, TW IV
							Menyusun laporan SPBE	TW I, TW II, TW III, TW IV
						7. Tata usaha dan rumah tangga	Mendata dan mengkoordinir peminjaman ruangan rapat	TW I , TW II, TW III dan TW IV
							Melakukan pemeliharaan perlengkapan dan BMN perkantoran	TW I , TW II, TW III dan TW IV
							Melakukan pengadministrasian ketatausahaan dan persuratan	TW I , TW II, TW III dan TW IV
							Melakukan penilaian arsip usul musnah kementerian hukum	TW I, TW II

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA								
							Mengkoordinir serta memastikan petugas kebersihan dan keamanan berjalan dengan baik	TW I , TW II, TW III dan TW IV



Palembang, 21 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah,

Agato P P Simamora